



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI  
KE PROVINSI SUMATERA BARAT TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN  
LINGKUNGAN, PENATAAN KAWASAN PARIWISATA BERBASIS LINGKUNGAN,  
DAN KAWASAN PROGRAM REFORMA AGRARIA**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2016-2017  
TANGGAL 21-23 JULI 2017**

**SEKRETARIAT KOMISI VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, 14 JULI 2017**

## I. PENDAHULUAN

Tekanan demografis dan dinamika ekonomi yang tinggi di Sumatera Barat berdampak terhadap kondisi lingkungan. Isu lingkungan yang mengemuka di Sumatera Barat menurut catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang focus pada permasalahan lingkungan menyoroti ada tujuh permasalahan lingkungan yang harus mendapat perhatian yaitu: kualitas air, degradasi lahan, perkebunan kelapa sawit, pencemaran udara, sampah, kerusakan laut dan ancaman keanekaragaman hayati.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi tujuh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat pada Februari 2016 adalah disebabkan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan. Di kawasan tersebut terdapat 22 Izin Usaha Pertambangan dan ada kegiatan Pertambangan Tanpa Izin.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikeluarkan Maret 2015, di Sumatera Barat terdapat 262 Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana 188 IUP berstatus operasi produksi dengan komoditas emas, timah hitam, galena, bijih besi, tembaga, mangan, batu kapur, kalsit dan batu bara. Dari keseluruhan IUP, 225 IUP bermasalah, 123 IUP logam dan batu bara serta 102 IUP batuan atau galian C. hanya 135 IUP yang *clear and clear*.

Aktivitas pertambangan terbuka memberi dampak besar bagi lingkungan karena berkurangnya daerah tangkapan air, meningkatnya laju aliran permukaan dan meningkatnya erosi lahan sehingga merusak daerah aliran sungai. Aktifitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di sepanjang daerah aliran sungai DAS Batanghari juga telah berkontribusi bagi kerusakan lingkungan hidup di Sumatera Barat, aktifitas PETI ini tidak lagi merupakan usaha tambang tradisional dengan alat sederhana melainkan sudah menggunakan alat berat.

Selain kegiatan pertambangan, kegiatan perkebunan yang bersifat monokultur juga ikut mendorong degradasi lingkungan. Di Kabupaten Pasaman Barat keberadaan perkebunan monokultur kelapa sawit mempengaruhi kondisi

lingkungan yaitu berkurangnya daya resap lahan sehingga menyebabkan meningkatnya aliran permukaan akibatnya menimbulkan bencana banjir.

Pelepasan kawasan hutan juga menjadi salah satu penyebab deforestasi di Sumatera Barat. Sejak 1987, lebih dari 242.827,56 hektar kawasan hutan dilepas jadi perkebunan sawit untuk 43 perusahaan baik modal asing maupun dalam negeri. Beban izin terhadap kawasan dari kegiatan IUP yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), izin HPH 221.872 hektar, HTI 83.213 hektar dan izin restorasi ekosistem 50.000 hektar berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di Sumatera Barat.

Konservasi lingkungan melalui kegiatan pariwisata saat ini sudah mulai dikembangkan di Sumatera Barat. Salah satunya adalah obyek wisata Nyarai di hutan Gamaran . Dengan dikembangkannya kawasan wisata di hutan Gamaran aktivitas perusakan hutan mulai berkurang

dan masyarakat mulai mengemangkan kegiatan usaha dari sector pariwisata . Kawasan wisata air terjun Nyarai berada dua jam berjalan kaki ke tengah hutan Gamaran . Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri hutan dan melintas sungai . Sejak dibuka pada juli 2013 , Nyarai sudah dikunjungi hingga delapan puluh ribu wisatawan . Keindahan alam dan paket yang ditawarkan pengelola menjadi daya tariknya. Dalam waktu singkat , kawasan wisata Nyarai dan hutan Gamaran sudah menjadi sorotan dunia dan meraih berbagai penghargaan . Seperti kawasan outdoor terbaik versi European Outdoor Conservation tahun 2015 dan pemenang lomba sadar wisata dan sapa pesona dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif .

Reforma Agraria adalah bagian dari program Pemerintah yang bersifat afirmatif dan perlu didukung. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian ada sejumlah tanah yang dapat dijadikan obyek reforma Agraria. Lahan-lahan tersebut sebagai berikut:

- ada 211.522 hektare (ha) lahan yang siap didistribusikan ke masyarakat dan dikelola untuk akses perhutanan sosial. Lahan tersebut akan dibagikan untuk 48.911 kepala keluarga.
- Ada 3.800 ha dan 220.000 ha lahan dari total 4,5 juta ha lahan yang siap dilegalisasi untuk program tersebut.
- Tanah telantar yang dapat dijadikan proyek Ada sekitar 23.000 ha lahan terlantar yang siap didistribusikan.
- Lahan pelepasan kawasan hutan seluas 707.000 ha dari 4,5 juta ha. Lahan tersebut diidentifikasi tersebar di beberapa provinsi, seperti; Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku.

Khusus untuk Sumatera Barat, Komisi VII DPR RI ingin mengetahui lokasi yang tepat lahan-lahan yang diperuntukkan untuk reforma agrarian.

## **II. DASAR HUKUM KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 10 Juli Tahun 2017 dan dilanjutkan Rapat Intern Pimpinan Tanggal 10 Juli terkait usulan anggota Komisi VII DPR RI pada Rapat Kerja dengan Menteri ESDM tanggal 10 Juli Tahun 2017 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 tentang pentingnya melakukan kunjungan spesifik ke wilayah tempat operasi BUMN serta merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke adalah Provinsi Sumatera Barat untuk melihat secara langsung:

- Permasalahan lingkungan di Sumatera Barat
- Penataan Kawasan Pariwisata berbasis lingkungan

- Kawasan Program Reforma Agraria

#### **WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN**

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Bontang dan Samarinda adalah tanggal 21 - 22 Juli 2017. Adapun agenda tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolda Sumatera Barat, Bupati Pesisir Selatan beserta jajarannya
2. Peninjauan Kawasan yang terkena Program Reforma Agraria di Sumatera Barat.

#### **IV. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN**

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Sumatera Barat untuk mengetahui secara lebih komprehensif permasalahan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi dan social masyarakat, dan bagaimana mendapatkan solusi berupa kebijakan yang mampu menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu juga mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana melakukan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi referensi untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah dan mitra terkait.

#### **V. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI KE SUMATERA BARAT**

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunjungan ke Sumatera Barat sebagai berikut :

No	Nama	No Angg	Fraksi	Jabatan
1	Ir. H. Mulyadi	A-403	P.Demokrat	K. Tim
2	Syajkhul Islam Ali, Lc, M.Sos	A-63	PKB	WK.Tim
3	H.N. Falah Amru, SE	A-203	PDIP	Anggota

4	Awang Ferdian Hidayat	A-222	PDIP	Anggota
5	Drs. KH. Nawafie Saleh, SE, MM	A-259	P.Golkar	Anggota
6	Eni Maulani Saragih	A-278	P.Golkar	Anggota
7	Aryo P.S. Djojohadikusumo	A-342	P.Gerindera	Anggota
8	Ramson Siagian	A-362	P. Gerindara	Anggota
9	DR.Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, MSc	A-502	PAN	Anggota
10	H. Ihwan Datu Adam, SE	A-447	P.Demokrat	Anggota
11	DR. H. Zulkiefliemansyah, SE	A-116	PKS	Anggota
12	DR. Andi Jamaro Dulung M.Si	A-542	PPP	Anggota
13	Ir. Firmansyah Mardanoes	A-537	PPP	Anggota
14	H. Endre Saifoel	A-6	P. Nasdem	Anggota

## VI. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatera Barat Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :

### a. Persiapan

- Menghimpun data dan informasi awal.
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi lokasi kunjungan kerja.
- Mempersiapkan administrasi keberangkatan

### b. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan diskusi didalam ruangan.

### c. Pelaporan

Pelaporan merupakan resume kegiatan yang dituangkan secara deskriptif.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **2. 1. Peninjauan ke lokasi**

##### **2.1.2. Peninjauan Lokasi Kecamatan Koto XI Tarusan Nagari Mandeh**

Nagari Mandeh salah satu kanagarian yang berada di kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kanagarian Mandeh terdiri dari empat kampung yaitu Sungai Sangkir, Taratak, Tengah dan Baru.

Koto XI Tarusan pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sebesar 48.590 jiwa. Sektor Pertanian adalah salah satu mata pencaharian yang dominan di kecamatan Koto XI Tarusan, saat ini luas lahan pertanian 2.038 Ha dengan rincian sawah irigasi teknis 950 ha, tadah hujan 1.076 Ha dan Lebak 12 Ha. Kecamatan Koto XI Tarusan adalah penghasil tanaman perkebunan yang penting. Merupakan penghasil gambir yang cukup penting di kabupaten Pesisir Selatan, ada sekitar 9.064 pohon dengan produksi 1.989,20 ton per tahun, selain itu juga penghasil kakao atau coklat. Di Koto XI Tarusan ada sekitar 1.096 pohon coklat dengan produksi 400 ton setahun. Juga merupakan penghasil Pinang, dengan luas 286 Ha, produksi Pinang mencapai 125 ton per tahun. Wilayah kecamatan Koto XI Tarusan 13.187 Ha berupa hutan lindung dan 14.158 berupa suaka margasatwa. Sektor perikanan adalah sektor yang cukup penting sebagai penggerak ekonomi di Koto XI Tarusan. Di kecamatan Tarusan terdapat 363 kegiatan usaha perikanan. Sebagian besar berada di Kanagarian Mandeh. Selain perikanan laut di Mandeh juga berkembang perikanan darat, ada sekitar 395 ha kolam dengan produksi 1.835,0 ton per tahun. Nelayan di Mandeh saat ini jumlahnya mencapai 3.482 atau setara dengan 7,17% dari total penduduk Koto XI Tarusan. Jumlah kapal penangkap ikan mencapai 375 unit 95,2% merupakan kapal motor dengan alat tangkap berupa pukat. Produksi ikan laut di Koto XI Tarusan mencapai 7.066,85 ton dengan nilai setara Rp 172.162,80 juta.

Selain sektor perikanan, Koto XI Tarusan memiliki obyek wisata bahari dengan kekhasan lingkungan berupa pulau-pulau karang yaitu Obyek Wisata Laut Mandeh Tausan. Kawasan ini berjarak sekitar 15 km dari ibu kota kabupaten Pesisir Selatan. Koto XI Tarusan memiliki 15 spot wisata alam, 1 spot wisata bahari dan 1 spot wisata hutan.

### 2.1.3. Obyek Wisata di Kecamatan Koto XI Tarusan

Koto Tarusan memiliki 12 pulau yang potensial menjadi obyek wisata berkelas dunia jika didukung dengan akomodasi yang memadai seperti infrastruktur jalan, listrik dan telekomunikasi. Gugusan pulau-pulau yang tersebar di Samudera Indonesia memiliki pesona seperti Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Pulau-pulau tersebut adalah sebagai berikut:

#### 12 Pulau Potensial Untuk Dikembangkan Sebagai Kawasan Wisata Bahari Dengan Keunggulan Keaslian Lingkungan

No	Nama Pulau	Jarak dari Ibukota Kabupaten
1	Pulau Babi	15 Km
2	Pulau Kumbang	20 Km
3	Pulau Putik Sanggua	22 Km
4	Pulau Setan	24 Km
5	Pulau Setan Kecil	24 Km
6	Pulau Nyamuk	37 Km
7	Pulau Marak Besar	38 Km
8	Pulau Marak Kecil	38 Km
9	Pulau Cubadak	38 Km
10	Pulau Pagang	43 Km
11	Pulau Bintagor	44 Km
12	Pula Bintagor Kecil	44 Km

Koto XI Tarusan juga memiliki sejumlah lokasi wisata diantaranya wisata sejarah yaitu kompleks situs kursi rajo kompleks makam Sultan Perhimpunan Alam berada di Kampung Duku Selantan Nagari Duku. Situs ini berjarak 22 Km dari ibukota Kabupten Pesisir Selatan, penangkaran hewan primate di pulau Marak berjarak 38 Km dari ibukota kabupaten.

Permasalahan yang menghambat perkembangan pariwisata di kabupaten Pesisir Selatan adalah kualitas infrastrktur jalan. Berdasarkan data dari Kabupten Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2015 kondisi jalan yang baik hanya 36,81%.



Sedangkan 61,19% berada dalam keadaan rusak, rusak ringan 10,09%, rusak 25,97% dan rusak berat 27,13%. Panjang jalan di Koto XI Tarusan mencapai 129 Km, jalan dengan kondisi baik 67,80 Km. Jalan dengan kondisi rusak 22,40 Km dan rusak berat 28,90 Km. Sedangkan jalan yang belum beraspal berupa jalan diperkeras dengan batu kerikil 18,70 Km dan jalan tanah 29,60 atau setara dengan 37,44% dari total jalan di Koto XI Tarusan.

#### **2.1.4. Kondisi Lingkungan Hidup di Koto XI Tarusan**

Penggunaan lahan/Tutupan Lahan di Koto XI Tarusan dengan luas 44.890,15 Ha. Kawasan terluas berupa hutan lindung dengan luas 37,319.97 Ha, sawah 3,763.94 Ha, perkebunan 2,767.95 Ha, pemukiman 677.94 Ha, lahan kering 301,95 ha. Lahan non pertanian 58,40 Ha. Memperhatikan penggunaan lahan di Koto XI Tarusan nampak bahwa yang dominan adalah hutan lindung, oleh karena itu kelestarian lingkungan menjadi sangat penting dan strategis bagi kecamatan Koto XI Tarusan. Apa lagi bentang dan kontur lahan di Koto XI Tarusan berada di perbukitan dengan kemiringan diatas 40% mencapai 29.639 Ha atau 69,63% dari total lahan. Lahan landai dengan kemiringan 0 – 2% hanya 5.436 Ha, Kemiringan 2 – 15% 350 Ha, kemiringan 15 – 25% 2.314 Ha, dan kemiringan 25 – 40% seluas 4.824 Ha.

Kawasan hutan di Koto XI Tarusan 45.722 adalah kawasan Sumber Daya Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, 11.720 Ha adalah kawasan hutan lindung, sedangkan hutan produksi hanya 3.875 Ha. Kawasan hutan lindung Pesisir Selatan 23,57% berada di kecamatan Koto XI Tarusan.

Hutan Lindung di kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 mencapai luas 49,720 Ha, namun berangsur-angsur hutan lindung tersebut mengalami alih fungsi. Lahan hutan lindung yang mengalami alih fungsi mencapai 6.244, 17 Ha atau 12,56%. Alih fungsi untuk perkebunan adalah yang paling besar yaitu 5.800,98 Ha. Hutan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan juga mengalami alih fungsi. Total lahan hutan yang mengalami alih fungsi mencapai 2.825,37 Ha. Alih fungsi terbesar untuk perkebunan. Ironisnya Koto XI Tarusan memiliki lahan kritis terluas nomor dua di Pesisir Selatan yaitu sebesar 3553,50 Ha. Sedangkan kawasan lahan kritis terbesar berada di kecamatan Lunang Silaut. Total lahan kritis di Pesisir Selatan mencapai 32.978,20 Ha.

Faktor Keunggulan Daerah untuk Pariwisata Koto XI Tarusan adalah keaslian dan keanekaragaman hayati, dan pesona alam bahari. Mandeh adalah kawasan wisata bahari yang mengandalkan keaslian alam. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, Kawasan Mandeh adalah kawasan yang paling menderita kerusakan terumbu karang.

Kerusakan Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

No.	Kecamatan (di pesisir)	Luas Tutupan (Ha)	Persentase Luas Terumbu Karang (%)			
			Sangat Baik	Baik	Sedang	Rusak
1	Koto XI Tarusan	1,210	5.00	10.0	3.00	21.60
2	Bayang	1,150	7.00	43.4	5.60	14.4
3	IV Jurai	1,218	4.00	11.0	5.00	29
4	Batang Kapas	1,770	6.00	12.0	3.00	13.33
5	Sutera	1,424	4.50	9.7	3.10	12.43
6	Lengayang	1,142	5.80	11.0	5.00	9.19
	Total	7,914	5.38	16.17	4.12	16.66

Keterangan :

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

Pulau-pulau di kawasan Mandeh juga mengalami kerusakan terumbu karang yang cukup signifikan.

No	Nama Pulau	Kondisi Terumbu Karang
1	Pulau Babi	Baik
2	Pulau Kumbang	Rusak Berat
3	Pulau Putik Sanggua	Tidak ada data
4	Pulau Setan	Tidak ada data
5	Pulau Setan Kecil	Tidak ada data

6	Pulau Nyamuk	Tidak ada data
7	Pulau Marak Besar	Tidak ada data
8	Pulau Marak Kecil	Tidak ada data
9	Pulau Cubadak	Tidak ada data
10	Pulau Pagang	Tidak ada data
11	Pulau Bintagor	Tidak ada data
12	Pula Bintagor Kecil	Tidak ada data

Kerusakan ekosistem di kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya di kawasan darat, tetapi di kawasan laut. Selain kerusakan terumbu karang, yaitu berkurangnya tutupan dan matinya sejumlah karang juga rusaknya padang lanun. Padang Lanun ini tempat yang penting bagi biota laut untuk melakukan reproduksi, selain di kawasan hutan mangrove.

**Tabel SD-20. Luas dan Kerusakan Padang Lamun**  
Kabupaten : Pesisir Selatan  
Tahun Data : 2010

No	Kecamatan Koto XI Tarusan (di Pesisir)	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
1	Mandeh	54.33	28.37
2	Pulau Cubadak	56.43	17.87
3	Pulau Sironjong	87.34	14.43
4	Pulau Setan	72.9	18.58
	Total	271	19.81

Keterangan :

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

Hutan Mangrove di Pesisir Selatan yang kondisinya relative baik hanya di Koto XI Tarusan. Luas hutan mangrove mencapai 325 Ha dengan persentase tutupan 37,3% dan tingkat kerapatan pohon 37,30 per Ha.

**Tabel SD-21. Luas dan Kerapatan Hutan Mangrove**

**Kabupaten : Pesisir Selatan**

**Tahun Data : 2010**

No	Lokasi	Luas Lokasi (ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/ha)
1	Koto XI Tarusan	325	37.3	37.30
2	IV Jurai	0.50	10.17	10.17
3	Batang Kapas	1.20	15.62	15.62
4	Pancung Soal	25	19.37	19.37
	Total	<b>351.7</b>	<b>82.46</b>	<b>20.62</b>

Keterangan :

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

Meskipun lahan di kawasan Koto XI Tarusan sebagian besar adalah lahan dengan kemiringan di atas 15 derajat, namun lahan dengan kemiringan 0 – 2 derajat sangat rawan terhadap bencana banjir. Total lahan yang rentan terhadap banjir mencapai luas 426,63 Ha. Selain banjir, tanah longsor juga mengancam wilayah Koto XI Tarusa. Lahan sekitar 174,83 Ha dengan tingkat kerawanan longsor tinggi.

#### **2.1.5. Lokasi Wisata Mandeh**

Kawasan Wisata Mandeh ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan No 9 Tahun 2003 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Wisata Mandeh. Kawasan ekowisata bahari memiliki prospek wisata yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari berskala nasional karena lokasi dan kondisinya mirip kawasan wisata bahari Raja Ampat di Papua Barat.

Secara administratif kawasan wisata Mandeh terletak di Sekitar Jorong Carocok, Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan Kawasan Mandeh menjadi kawasan Nasional pada tahun 2015 ditetapkan oleh BAPENAS RI. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir

Selatan, khususnya di seluruh Kawasan Mandeh Kecamatan Tarusan telah diarahkan sebagai salah satu pengembangan objek wisata bahari sejak tahun 2002 melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, maraknya perkembangan wisata terjadi setelah peningkatan kawasan tersebut menjadi kawasan nasional.



#### **Kawasan Wisata Bahari Mandeh**

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2013 hingga 2014 telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dal jumlah kunjungan wisatawan ke Kawasan Mandeh.

Permasalahan yang dihadapi oleh obyek wisata Mandeh adalah belum adanya Rencana Induk Pengembangan Wisata Bahari Kenagarian Mandeh dalam bentuk *blue print* pengembangan wilayah wisata secara berkelanjutan (*sustainable development*). Kondisi ini akan memperbesar peluang dan kemungkinan gagalnya pengembangan wisata bahari Kenagarian Mandeh dalam beberapa tahun kedepan. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun basis ekowisata bahari adalah mengintegrasikan seluruh pihak terkait (*stake holders*) dalam mencapai konsep wisata yang berkelanjutan baik dalam dimensi lingkungan, budaya dan sosial-ekonomi (European Commision Tourism Unit, 2000). Pihak yang terkait dalam

pengelolaan ekowisata bahari tersebut adalah Pemerintah Pusat, Pemerintahan Lokal (Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), masyarakat lokal, wisatawan, investor, LSM (*Non-Governmental Organisation*), dan termasuk mereka yang tidak berhubungan langsung dengan sektor wisata seperti nelayan dan petani (Bjork, 2000).

Pada dasarnya, setiap pembangunan wilayah harus dimulai dengan persiapan perencanaan yang matang. Pembangunan rencana induk tersebut diarahkan sebagai dasar dalam pengembangan ekowisata bahari Kenagarian Mandeh dalam konsep "*sustainable development*". Secara umum dalam tahapan perencanaan pengembangan ekowisata Kenagarian Mandeh berbasis ekowisata terdapat empat aspek yang wajib terpenuhi, yaitu: mempertahankan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin kepuasan wisatawan, dan meningkatkan keterpaduan (Gunn, 1993).

Keterlibatan masyarakat lokal merupakan salah satu bagian dari visi ekowisata bahari, karena pada dasarnya ekowisata memiliki tiga kriteria, yaitu: memberikan nilai konservasi, melibatkan masyarakat, dan memiliki nilai ekonomi (Tuwo, 2011). Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat sekitar agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan pulau-pulau kecil secara lestari (BPSPL Padang, 2010). Peranan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata bahari Kenagarian Mandeh memiliki arti yang sangat penting, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam membangun keterlibatan masyarakat lokal tidak cukup dengan mengikutkan masyarakat dalam proses perencanaan dan ikut andil dalam pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan sumberdaya manusia masyarakat lokal merupakan hal yang perlu dilakukan, hal tersebut dilakukan agar masyarakat lokal memahami keterlibatannya dalam pengembangan ekowisata bahari tersebut. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang bagus, masyarakat akan mampu untuk lebih kreatif dalam melihat peluang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga pengembangan ekowisata bahari Kenagarian Mandeh berhasil, baik dari dimensi lingkungan, budaya dan sosial-ekonomi.

Prinsip perencanaan penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan rencana yang disusun untuk menyesuaikan berbagai kondisi, potensi, isu dan permasalahan wilayah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dalam penataan ruang. Rekomendasi rencana zonasi (pola ruang dan struktur ruang) ini sifatnya mempertegas, melengkapi dan mengoreksi pola ruang yang sudah dianalisis di lapangan lokasi penelitian (KKP dan BPSPL Padang, 2010).

Penyusunan zonasi pengembangan ekowisata bahari Kenagarian Mandeh merupakan amanat UU No. 27 tahun 2007, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 tahun 2008 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; menjamin harmonisasi antara kepentingan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan, daya dukung sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Konsep ekowisata merupakan sebuah konsep baru dalam pengembangan wisata yang dibangun di atas dasar wisata yang berkelanjutan (Garrord and Wilson, 2003). Dalam teorinya ekowisata harus mampu membangun kesan positif bagi wisatawan dan masyarakat lokal, dengan cara meminimalisir dampak terhadap lingkungan, menghormati budaya, dan menyediakan alokasi biaya untuk kegiatan konservasi dan kesejahteraan masyarakat lokal (Dobson, 2003). Maka, terdapat beberapa hal penting yang perlu dihitung untuk mencapai pengembangan ekowisata bahari yang sukses, termasuk perhitungan daya dukung lingkungan.

Salah satu cara untuk meningkatkan efek ekonomi kegiatan wisata bahari Kenagarian Mandeh terhadap kesejahteraan masyarakat lokal adalah dengan meningkatkan daya saing dan kreatifitas masyarakat lokal dalam usaha ekonomi wisata. Sejauh ini kemampuan masyarakat lokal Kenagarian Mandeh masih sangat minim dalam menghasilkan peluang-peluang ekonomi kreatif untuk menyuplai permintaan dan kebutuhan wisatawan. Ekonomi kreatif tersebut dapat berupa penyediaan kerajinan tangan masyarakat lokal, souvenir lokal yang mencitrakan kebudayaan setempat, akomodasi berbasis alam dan budaya lokal, dan masakan khas lokal (Klein, 2003).

Dalam pengembangan ekowisata bahari Kenagarian Mandeh, keberadaan upaya konservasi dalam bentuk program merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Pada dasarnya pengembangan wisata bahari berbasis ekowisata sudah mampu mengurangi resiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat aktivitas wisata. Namun, sebuah kegiatan pemanfaatan alam seperti bidang industri pariwisata, masih memiliki kemungkinan akan memberikan pengaruh terhadap kestabilan lingkungan, terutama ketika terjadi *human error* dalam pengelolaannya. Pada kondisi tersebut, upaya program konservasi menjadi sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kestabilan lingkungan tersebut. Program konservasi juga dapat dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi bencana yang mungkin timbul di lokasi objek. Program konservasi yang dapat dilakukan antara lain: reboisasi mangrove, tranplantasi karang, dan sebagainya.

Dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata bahari Kenagarian Mandeh sebagai salah satu pengembangan wisata bahari yang berwawasan lingkungan, pengawasan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Pengawasan merupakan salah satu tahapan akhir dari pelaksanaan pengelolaan sebuah wilayah untuk memastikan semua rencana dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk memastikan pengawasan pengelolaan ekowisata bahari Kenagarian Mandeh harus dilakukan oleh pemerintah setempat dibantu oleh aparat penegak hukum dan masyarakat lokal. Keberadaan masyarakat sebagai salah satu pihak yang membantu pengawasan sangat penting, karena masyarakat merupakan subjek yang akan bersentuhan langsung dengan lokasi objek wisata. Pengawasan terhadap pengelolaan ekowisata bahari Kenagarian Mandeh harus didukung oleh kebijaksanaan dan landasan hukum yang kuat dan jelas.

#### **2.1.6. Isu Lingkungan Kawasan Wisata Mandeh**

Pembabatan hutan mangrove seluas 1,2 Ha di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat dirusak. Perusakan terjadi bersamaan dengan pembangunan penginapan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Akibat pembabatan hutan mangrove juga terjadi perusakan terumbu karang untuk membuat dermaga pribadi. Dari beberapa wilayah di Mandeh yang paling parah mengalami kerusakan adalah di Nagari Sungai Nyalo. Tokoh adat setempat yang juga



Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai, Asrizal Datuak Rajo Nan Sati mendorong pemerintah kabupaten mengambil sikap tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan di kawasan wisata terpadu Mandeh.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Reskrimsus Polda Sumbar, didampingi Tim Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap kerusakan hutan bakau (mangrove), terlihat jelas di sejumlah titik lokasi pohon mangrove seperti sengaja dirusak oleh pelaku, karena pada saat itu ada bekas timbunan dan bekas pengerjaan. Terkait kerusakan hutan mangrove dan sejumlah kawasan strategis lainnya di kawasan wisata terpadu Mandeh Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan kajian lebih dalam serta melihat sejauh mana potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Polda Sumbar Sumbar tak akan diam dalam menghadapi persoalan tersebut.



#### **Bupati Pesisir Selatan meninjau lokasi hutan Mangrove yang dibabat**

Perusakan hutan Mangrove, memunculkan kontroversi. Berbeda dengan Polda Sumatera Barat, Kepala Dinas kehutanan Sumatera Barat Hendri Octavia mengatakan, hutan bakau atau mangrove yang rusak di Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan berada di luar kawasan hutan

hingga pelaku tidak dapat dipidana. Ini disampaikan kepada pers sebagaimana dikutip oleh Antara pada 11 April 2017 19:20 WIB "Undang-Undang Kehutanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) memiliki sanksi pidana bagi pelanggarnya, tetapi tidak bisa diterapkan pada perusak hutan bakau di Pesisir Selatan."

Pihak Dinas Kehutanan Sumatera Barat telah melakukan pengecekan ke lapangan akhir 2016 dan mendapatkan bukti ada yang melakukan pembangunan di areal hutan bakau. Namun setelah diteliti, ternyata daerah itu berada di luar kawasan hutan."Kawasan itu masuk Area Penggunaan Lain (APL) karena itu bukan menjadi kewenangan Dinas Kehutanan dan kami tidak bisa melarang, untuk APL penggunaan lahan diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan,

Harus dilihat dulu RTRW-nya, apakah hutan bakau itu masuk kawasan perlindungan atau kawasan budi daya. Kalau kawasan perlindungan, kewenangan Pemkab Pesisir Selatan melakukan penindakan sesuai aturan daerah. Namun kalau menurut RTRW hutan itu masuk kawasan budi daya, maka pemilik lahan memiliki hak pula untuk memanfaatkan lahannya, meskipun dengan menebang hutan bakau. Untuk pemilik lahan yang berada dalam kawasan hutan itu nanti, tetap bisa membuka usaha tetapi terlebih dahulu harus mengajukan izin pada Dinas Kehutanan."

Sebelumnya, masyarakat Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan melaporkan pada gubernur telah terjadi kerusakan hutan bakau di daerah mereka sejak 2016 dengan total kerusakan 1230 meter persegi. Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menuding pejabat yang merusak hutan mangrove dan hutan lindung di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh ialah Nasrul Abit yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Rusma Yul Anwar, yang kini Wakil Bupati Pesisir Selatan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pesisir Selatan Suardi S mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin apa pun terkait pembangunan di Mandeh. Dalam waktu dekat, dia akan mengecek ulang bangunan di Mandeh bersama Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP setempat, dan organisasi perangkat daerah terkait.





#### **Tunas Mangrove tumbuh di bekas hutan yang dibabat**

Dalam pertemuan wakil ketua Komisi VII DPR RI Ir. Mulyadi dengan Kapolda Sumatera Barat diperoleh beberapa point penting untuk ditindaklanjuti:

- BPK bisa diminta untuk melakukan audit investigasi untuk menghitung kerugian negara akibat dari pembabatan hutan Mangrove di Mandeh.
- Kementerian Lingkungan Hidup diminta untuk menghitung kerugian negara dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perdata dan pidana.
- Tindakan melakukan cut and fill lahan di kawasan Mandeh oleh pemilik lahan perlu diklarifikas oleh Bupati Pesisir Selatan:
  - Apakah benar kegiatan pembangunan yang dilakukan di kawasan Mandeh itu merupakan pelanggaran lingkungan.
  - Perlu dilakukan pendalaman atas kasus tersebut oleh pihak yang berwenang dilengkapi dengan hasil penyidikan
  - Jika hasil penyidikan dirasakan cukup dan disertai bukti-bukti yang memadai dilakukan proses hukum.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. Mulyadi dengan Kapolda Sumatera Barat



Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

## BAB III

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 3.1. Kesimpulan

- Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI memahami permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan kawasan wisata Bahari Mandeh yaitu dengan adanya perusakan hutan Mangrove yang mengancam virginitas Kawasan Wisata tersebut dan yang menjadi nilai jualnya.
- Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI meminta kepada Komisi VII DPR RI untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk melakukan investigasi secara cermat dan akurat agar dapat dicapai penyelesaian kasus tersebut dengan cepat, akurat dan adil.
- Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI akan memperjuangkan kebutuhan pengembangan kawasan wisata Mandeh terutama yang berkaitan dengan infrastruktur yaitu listrik dan air bersih.

Commented [W1]:

#### 3.2. Rekomendasi

- Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan agenda membahas isu lingkungan terutama kasus kerusakan ekosistem pesisir.